



# MALUKU MASA DEPAN

Bunga Rampai Penelitian Para Akademisi Maluku  
Di Bidang Sosial Humaniora



Editor:  
**Jusuf Nikolas Anamofa, S.Si., M.Phil.**

**Eklefina Pattinama, Fransisca Jallie Pattiruhu, Marlen Wariunsora,  
Nelsano Anesry Latupeirissa, Revaldo Pravasta Julian Mb Salakory,  
Saidna Zulfiqar Bin Tahir, Victor Juzuf Sedubun**

*Maluku Masa Depan:*

# **Bunga Rampai Pemikiran Para Akademisi Maluku di Bidang Sosial Humaniora**

## UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan penistiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar, dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*Maluku Masa Depan:*

# **Bunga Rampai Pemikiran Para Akademisi Maluku di Bidang Sosial Humaniora**

Eklefina Pattinama, Fransisca J. Pattiruhu, Marlen Wariunsora,  
Nelsano A. Latupeirissa, Revaldo Pravasta Julian MB Salakory,  
Saidna Zulfiqar bin Tahir dan Victor Juzuf Sedubun

PENERBIT  
INSAN CENDERIA MANDIRI  
www.insancenderia.com

**Maluku Masa Depan: Bunga Rampai Pemikiran Para Akademisi Maluku  
di Bidang Sosial Humaniora**

**Eklefina Pattinama, Fransisca J. Pattiruhu, Marlen Wariunsora,  
Nelsano A. Latupeirissa, Revaldo Pravasta Julian MB Salakory,  
Saidna Zulfiqar bin Tahir dan Victor Juzuf Sedubun**

Editor:  
**Jusuf Nikolas Anamofa, S.Si., M.Phil.**

Desainer:  
**Mifta Ardila**

Sumber:  
**www.insancendekiamandiri.co.id**

Penata Letak:  
**Tiya Arika Marlin**

Proofreader:  
**Tim ICM**

Ukuran:  
**viii, 176 hlm., 15,5x23 cm**

ISBN:  
978-623-348-055-0

Cetakan Pertama:  
**Mei 2021**

---

Hak Cipta 2021, Eklefina Pattinama, dkk.  
Isi di luar tanggung jawab penerbitan dan percetakan

---

Hak Cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

**Anggota IKAPI: 020/SBA/20**

**PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI  
(Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI)**  
Perumahan Gardena Maisa, Blok F03, Nagari Koto Baru,  
Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok  
Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361  
HP/WA: 0813-7272-5118  
Website: [www.insancendekiamandiri.co.id](http://www.insancendekiamandiri.co.id)  
[www.insancendekiamandiri.com](http://www.insancendekiamandiri.com)  
E-mail: [penerbitbic@gmail.com](mailto:penerbitbic@gmail.com)

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	vi
<b>Eklefina Pattinama</b>	
Identitas Multikultural Salam-Sarani di Maluku sebagai Model Memelihara Integrasi Bangsa.....	1
<b>Fransisca J. Pattiruhu</b>	
Otonomi Desa di Maluku .....	37
<b>Marlen Wariunsora</b>	
Pewarisan Nyanyian Suku Babar di Maluku Barat Daya: dari Tradisional Menuju Digitalisasi .....	59
<b>Nelsano A. Latupeirissa</b>	
'Opo Fot' Nyanyian Memancing Ikan dalam Kajian Etnomusikologi .....	81
<b>Revaldo Pravasta Julian MB Salakory</b>	
Folk Dialogue sebagai Modal Sosial dalam Mewujudkan Perdamaian Islam-Kristen di Maluku .....	103
<b>Saidna Zulfiqar bin Tahir</b>	
Preservasi Bahasa Daerah Maluku Melalui Model Pembelajaran Multilingual .....	127
<b>Victor Juzuf Sedubun</b>	
Penetapan Hukum terhadap Desa Adat di Maluku .....	143
<b>Tentang Penulis .....</b>	
	171

## Kata Pengantar

Puji syukur patut dipanjangkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenaan-Nya saja, buku dengan judul “Maluku Masa Depan: Bunga Rampai Pemikiran Para Akademisi Maluku” dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku ini lahir sebagai bentuk kecintaan penuh terhadap proses pengembangan ilmu pengetahuan dan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi implikasi praktisnya untuk kemanusiaan dan alam semesta, terutama bagi pembangunan Maluku. Bunga rampai pemikiran yang terkompilasi dalam buku ini merupakan potret ilmiah terhadap realitas kekayaan sumberdaya alam, sumber daya manusia, keragaman dan keunikan sosial-budaya Maluku beserta segala permasalahannya. Buku ini diinisiasi oleh Forum Dosen Indonesia DPD Provinsi Maluku yang saat ini telah berubah namanya menjadi Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta DPD Provinsi Maluku di awal tahun 2020 namun baru terealisasi di awal tahun 2021.

Buku bunga rampai pemikiran “Maluku Masa Depan” terbagi atas dua bagian, yaitu Bagian I di bidang Sains dan Teknologi sementara Bagian II di bidang Sosial Humaniora. Pembagian bidang itu hanya untuk memudahkan proses kompilasi dan dapat menjadi petunjuk awal bagi para pembaca memuaskan keingintahuan tentang hal ikhwat yang dibahas pada bidang yang digeluti masing-masing.

Buku II, Bidang Sosial dan Humaniora memuat hasil penelitian dan pemikiran dari beragam topik, yaitu Identitas Multikultural Salam-Sarani di Maluku sebagai Model Memelihara Integrasi Bangsa; Otonomi Desa di Maluku; Pewarisan Nyanyian Suku Babar di Maluku Barat Daya: dari Tradisional Menuju Digitalisasi; ‘Opo Fot’ Nyanyian Memancing Ikan dalam Kajian Etnomusikologi; *Folk Dialogue* sebagai Modal Sosial dalam Mewujudkan Perdamaian Islam-Kristen di Maluku;

Preservasi Bahasa Daerah Maluku Melalui Model Pembelajaran Multilingual; dan Penetapan Hukum terhadap Desa Adat di Maluku.

Disadari bahwa kumpulan tulisan hasil penelitian dan pemikiran para peneliti yang ada di dalam buku ini belum secara utuh memotret realitas sosial budaya Maluku yang begitu kaya. Namun Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta DPD Provinsi Maluku memandang bahwa sudah saatnya hasil-hasil penelitian dan pemikiran para akademisi Maluku yang biasanya tersebar di jurnal-jurnal ilmiah dikumpulkan, diberikan tambahan-tambahan pikiran rekomendatif yang aplikatif bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Maluku. Tujuan jangka panjangnya adalah agar paradigma pembangunan berbasis kerja-kerja ilmiah yang terukur dan tanggung jawab semakin dikedepankan.

Akhir kata, sebagai pemrakarsa, kami mengucapkan selamat menimba dan menikmati dari sumur ilmu pengetahuan yang telah disediakan di dalamnya. Semoga buku "Maluku Masa Depan" ini dapat bermanfaat bagi masa depan Maluku.

Masohi, Maret 2021  
Perkumpulan Dosen Indonesia Semesta  
DPD Provinsi Maluku



Jusuf Nikolas Anamofa, S.Si., M.Phil.  
Ketua

# 1

## **Identitas Multikultural Salam-Sarani di Maluku sebagai Model Memelihara Integrasi Bangsa**

**Eklefina Pattinama**

### **A. Pendahuluan**

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat multikultural, masyarakat yang terdiri dari beragam komunitas budaya, sistem makna, nilai, bentuk organisasi, sejarah, adat istiadat, dan kebiasaan yang ada. Maluku termasuk masyarakat multikultural. Sesuai catatan data statistik masyarakat di Ambon, pada Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, dan Desa Saparua di Maluku Tengah penduduknya beragam dengan etnis, suku, ras, dan golongan berbeda. Perbedaan ini dapat menjadi kekuatan bagi membangun hidup bersama, tetapi dapat berpotensi mengancam integrasi bangsa.

Berbagai konflik di Indonesia dengan menggunakan atribut etnis dan agama mengancam integrasi bangsa. Disadari bahwa kebijakan nasional yang berbasis pemikiran pluralisme kebudayaan selama ini kurang berhasil dalam menjawab persoalan-persoalan integrasi bangsa masa kini. Konflik-konflik yang terjadi, upaya-upaya mengangkat kembali budaya lokal yang dalam banyak kasus sudah tidak fungsional dalam kehidupan masyarakat setempat juga meningkat, sehingga batas-batas antar etnis menjadi semakin tegas dan menguat (Hidayah, 2000).

Multikulturalisme muncul sebagai reaksi internal suatu bangsa terhadap proses anti integrasi dalam dirinya yang antara lain merupakan akibat pengaruh eksternal global yakni arus gerakan demokrasi dan hak asasi manusia global yang sering kali lintas bangsa dan tidak mempertimbangkan integritas internal suatu bangsa. Multikulturalisme bermula dari konsep masyarakat multikultural, yakni hadirnya beberapa kebudayaan bersama dalam suatu masyarakat. Konsep multikulturalisme itu mengandung tiga komponen, yakni 1) sesuatu yang berkenan dengan kebudayaan; 2) adanya pluralitas kebudayaan; 3) adanya sikap dan perilaku untuk menanggapi pluralitas tersebut (Parekh, 2000).

Sebagai gerakan kebudayaan, multikulturalisme secara intrinsik merupakan manifestasi dari kondisi-kondisi dunia multikultural global kontemporer yang tidak memuaskan. Multikulturalisme adalah akibat dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi dunia yang kapitalistik (Thompson, 1997). Multikulturalisme adalah realita sosial empiris yang dapat ditransformasikan menjadi suatu ideologi, suatu proses yang meniadakan keserakahan historisitas dari realitas empiris dan memandang "realitas" itu sendiri sebagai yang sesungguhnya secara alamiah. Sekalipun multikulturalisme dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih sempit, yakni memelihara dan mempertahankan integrasi nasional suatu bangsa, konsep ini pada dasarnya lebih berakar pada pemahaman dan gerakan demokrasi dan hak asasi manusia global yang sering kali lintas-bangsa dan kurang memperhatikan kepentingan lokal atau bangsa.

Memahami budaya yang berbeda dalam masyarakat yang multikultur bukanlah hal mudah. Setiap individu dalam masyarakat multikultur dituntut untuk mau mengerti realitas budaya orang lain yang membuat ada istilah 'mereka' dan 'kita'. Dalam situasi seperti itulah manusia juga dituntut untuk

mengungkap identitas orang lain. Melalui interaksi dalam kegiatan komunikasi, identitas tidak hanya memberikan makna tentang pribadi individu, lebih dari itu identitas menjadi ciri khas sebuah kebudayaan yang melatarbelakanginya. Identitas budaya merupakan ciri yang ditunjukkan seseorang karena orang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Hal itu meliputi pembelajaran tentang dan penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, keturunan dari suatu kebudayaan (Rozi, 2013).

Pada masyarakat multikultur penggunaan identitas diri multikultural menjadi kekuatan mengatasi anti integrasi bangsa. Masyarakat multikultural di Maluku Tengah Ambon-Saparua sebagai kekuatan memelihara integrasi bangsa pada konflik politisasi agama, etnis, tahun 1999 nampak pada interaksi sehari-hari dengan menggunakan identitas diri mereka sebagai anak negeri Salam-Sarani. Kekuatan mempertahankan identitas diri ini nampak tidak hanya dalam kuatnya hubungan kekerabatan pela dan gandong tetapi juga hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam kesatuan kebudayaan. Kuatnya perekat kesatuan budaya ini membuat semakin terpeliharanya konsep identitas diri anak Negeri Salam-Sarani dari generasi ke generasi berhadapan dengan berbagai perkembangan ke depan.

Identitas diri multikultural menurut Giddens, terbangun oleh kemampuan untuk mempertahankan narasi diri. Di dalam narasi diri, yang dituntut adalah kemampuan untuk membangun perasaan yang konsisten soal kesinambungan biografi diri. "Diri" menjadi proyeksi refleksif, artinya diri menjadi sesuatu untuk direfleksi, dibentuk dan bahkan dicetak kembali. Kesadaran refleksif diri, cara untuk memperoleh kondisi yang asli dari "diri" melalui praktik sosial yang berulang dan terpola menurut ruang dan waktu. Melalui aktivitas sehari-hari diri dengan diri yang lain yang hadir bersama secara fisik dalam konteks interaksi yang terikat oleh situasi. Ciri khas sosial

kehadiran bersama berakar pada spatialitas tubuh yang terarah kepada yang lain dan kepada diri yang mengalami. Spatialitas tubuh merujuk spatialitas situasi, pada situasi tertentu tubuh aktif dalam ruang dan waktu, membantu individu melindungi tubuhnya, memberi rasa aman pada diri atau memberi keamanan pada diri dan juga pada keamanan kehidupan sosial, melalui tindakan interaksi sehari-hari antar individu (Anthony, 1991).

Upaya untuk melihat gejala bekerjanya tindakan dan interaksi individu-individu memelihara integrasi bangsa dalam suatu proses, bukan menjadi isu kultur tetapi menjadi isu struktural. Isu struktural ini dapat dilihat dalam isu strukturasi Giddens. Kontribusi pemikiran Giddens dimanfaatkan untuk membaca data penelitian lapangan. Memahami pemikiran Giddens, tentang teori strukturasi merupakan proses di mana struktur dibentuk melalui tindakan, dan tindakan dibentuk oleh struktur. Interaksi sehari-hari sebagai salah satu model memelihara integrasi bangsa (Giddens, 1995).

## B. Realitas Multikultural di Maluku

Multikulturalisme merupakan ideologi dan strategi alternatif yang bisa menjaga integrasi nasional di tengah memudarnya pengaruh dan kontrol kekuasaan negara dan menguatnya pengaruh globalisasi yang membuat batas-batas negara-bangsa semakin kabur. Munculnya konsep multikulturalisme memberikan gambaran bahwa setiap identitas yang berbeda harus saling memahami dan memaknai perbedaan, sehingga mereka dapat hidup dalam ruang bersama, walaupun kultural berbeda tetapi dapat saling menerima, menghargai keberagaman. Multikulturalisme dapat merubah prasangka diskriminasi dan superioritas antar kelompok masyarakat (Subkhan, 2020).

Ana Irhandayaningsih mengatakan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah paham, penghargaan, dan penilaian akan budaya seseorang serta sebuah penghormatan dan

keingintahuan tentang budaya etnis lain. Pada multikulturalisme tidak ada dominasi budaya tertentu terhadap budaya yang lain. Sebaliknya semua kelompok dalam keberagaman dapat mengekspresikan, atau mengartikulasikan identitas kulturnya, secara luas tanpa ada ancaman dari kelompok mayoritas, dan mendapat perlakuan yang sama dan setara dari negara. Di sini negara menjadi institusi yang bertugas memastikan bahwa setiap kelompok komunitas dijamin hak-hak kulturalnya (Ana Irhandayaningsih, 2018) (Jatmiko, 2006).

Multikulturalisme dikenalkan pertama kali di Amerika untuk menggambarkan realitas kemajemukan etnis, dan persoalan rasisme terhadap etnis Negro, yang berlangsung pada zaman pra-kolonial hingga tahun 1960-an. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthoni Richard, bahwa dalam suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat multikultur memiliki potensi munculnya persoalan rasisme. Hal ini berpengaruh bagi sikap intolerisme, diskriminasi, dominasi, hegemoni, penindasan dan lain-lain dari kelompok dominan (ras kulit putih) terhadap suku dominan (Ras Negro dan kelompok pribumi), sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka yang ter-subkordinat untuk mengekspresikan kultur mereka (Taylor, 1994) (Richard, 1995).

Multikulturalisme muncul sebagai kritik terhadap adanya klaim monokultur yang dominan dan memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya praktik dominasi terhadap ras tertentu di Amerika. Sikap diskriminasi etnis berdasarkan warna kulit, suku bangsa dan agama, muncul juga dalam sistem pemerintahan Amerika yang bercorak puritanis yang memosisikan agama kelompok dominan (kulit putih) sebagai eksklusif, sehingga mengikis unsur-unsur budaya lokal dengan segala kepercayaan dan dipaksakan berintegrasi dalam agama kelompok dominan (Golberg, 1995).

Bertolak dari penjelasan Corrbert, bahwa suatu sistem pemerintahan yang tidak adil dan jika unsur etnis serta agama dijadikan sebagai dasar kebijakan sebuah sistem pemerintahan, dapat berpotensi bagi terciptanya rasisme terhadap kelompok etnis tertentu. Jadi, multikulturalisme berfungsi sebagai reaksi dan kritik terhadap sosiologi Amerika yang diwarnai dengan sistem politik diskriminasi serta sistem pemerintahan yang bersifat rasial. Selain itu, multikulturalisme juga berfungsi untuk mempromosikan keberagaman kultural di Amerika Serikat. Hal ini bertujuan agar warga Amerika semakin terbuka menerima keberagaman dan terjadi pembaharuan budaya, ras antarwarga Amerika dan pendatang, sehingga terjadi kontak kultural dari berbagai identitas yang ada (Rubin, 2009).

Di Indonesia konsep multikulturalitas dan pluralitas mengandung banyak kesamaan untuk menggambarkan kemajemukan sebuah masyarakat. Namun ketika ditambah akhiran "isme" yang mengindikasikan sebuah ideologi, cara pandang dan doktrin normatif, kedua konsep ini berbeda. Jika pluralisme menekankan kemajemukan elemen-elemen penyusunnya, maka multikulturalisme lebih memfokuskan pada interaksi dan relasi antarelemen-elemen itu. Multikulturalisme dapat dilakukan melalui pengakuan budaya (*cultural recognition*) dan perlakuan yang setara sifatnya terhadap eksistensi seluruh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kedua hal ini muncul sebagai alternatif atau secara untuk mengubah segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat terhadap kelompok etnis agama, ras tertentu dalam masyarakat atau negara. Pengakuan budaya dilakukan atas kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui oleh publik, atas dasar kemanusiaan sebagai identitas setiap individu. Karenanya pengakuan budaya menjadi nilai yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan konsep multikultural, di mana setiap individu, kelompok diperlakukan dengan hormat dan setara. Azyumardi

Azra menyatakan bahwa pentingnya sebuah pengakuan budaya, sebab fakta sosial selalu memperlihatkan bahwa identitas seseorang selalu dinegosiasikan melalui kontak kultural (dialog) dengan orang lain. Olehnya itu, pengakuan budaya sangat penting agar dapat menolak kerusakan hubungan antar kultur dan membuka ruang kepada setiap kultur agar menunjukkan eksistensinya. Sehingga setiap kultur tetap bertahan di tengah kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Dengan demikian, setiap individu dan kelompok dapat menerapkan identitas kultur, serta menemukan nilai dibalik setiap kultur masing-masing (Azra, 2007).

Bhiku Parekh, memetakan lima macam masyarakat multikultural, yaitu (Thompson, 1997)

1. Multikulturalisme Isolasionis, di mana setiap kelompok budaya menjalankan hidup secara sendiri-sendiri (otonom) dan kurang membangun interaksi sosial dengan kelompok masyarakat lain.
2. Multikulturalisme Akomodatif, di mana kelompok-kelompok budaya dominan membuat penyesuaian dan mengakomodir kebutuhan kultural kaum minoritas.
3. Multikulturalisme Otonomis, di mana tipe ini masyarakat ingin mewujudkan kesetaraan antarkelompok-kelompok budaya, baik budaya yang dominan maupun yang kurang dominan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mempertahankan hidup, memiliki hak yang sama dan memiliki mitra yang sejajar.
4. Multikulturalisme Kritikal atau Interaktif, di mana masyarakat kurang terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom. Karena itu, mereka lebih menghendaki adanya pencipta kultur kolektif bagi semua orang.
5. Multikulturalisme Kosmopolitan, di mana pada tipe ini masyarakat ingin menghapus batas-batas wilayah agar pemilik-pemilik budaya tidak lagi terikat lagi dengan budaya-

nya. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan mengembangkan kehidupan kulturalnya secara sendiri-sendiri.

Realitas multikulturalis otomatis terdapat pada masyarakat Maluku Tengah, Kecamatan Kepulauan Lease, Masyarakat Saparua masyarakat heterogen, ditandai oleh beragam etnis. Kekayaan rempah-rempah mengundang para pedagang rempah-rempah dari Kerajaan Tidore dan Ternate sekaligus menyiarkan agama Islam. Pada abad 17 di bawah kekuasaan Belanda menjajah dan mengambil rempah-rempah di Saparua, juga mengkristenkan sebagian masyarakat Saparua. Kekayaan rempah-rempah di Saparua turut mengundang para pedagang luar: dari Arab, dari Jawa, Madura, Buton, datang dan menetap di Saparua. Sementara itu ikatan sosial masyarakat Maluku Tengah di Saparua di negeri Salam-Sarani (Islam dan Kristen) berdasarkan ikatan-ikatan genealogis, teritorial dan kepercayaan. Perbedaan agama, suku, etnis menjadi realitas hidup bersama dalam kedamaian. Sampai saat pecahnya konflik 1999 di Maluku, Saparua turut mengalaminya. Menarik di tengah konflik itu masyarakat menciptakan integrasi baru: Berdasarkan ikatan sosial pela gandong, identitas sosial membangun kebersamaan dalam budaya yang berbeda (Dieter, 1977).

Ciri masyarakat multikultural yang sama ditemukan pada Desa Wayame merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Ambon sekaligus menjadi Ibu Kota Kecamatan Teluk Ambon, Provinsi Maluku. Luas wilayah Desa Wayame adalah 72.000 hektar yang terbentang dari daerah pegunungan sampai wilayah pantai. Desa Wayame tidak jauh dari Kota Ambon dengan adanya jembatan Merah Putih, masyarakat Wayame hanya dalam waktu 10 menit menjangkau Kota Ambon. Letak Desa Wayame yang sangat strategis ini, membuat desa ini menjadi sasaran pemukiman penduduk yang datang dari berbagai

daerah suku, ras, etnis: Aceh (17jw); Batak (36jw), Minang (85jw); Sunda (222jw); Jawa (378jw); Madura (78jw); Bugis (132jw); Buton (398jw); Makasar (144jw); Minahasa (155jw); Flores (63jw); Timor (47jw); Ternate (98Jw); Papua (40jw). penduduk Desa Wayame juga berbeda agama: Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Walaupun masyarakat Desa Wayame hidup berbeda etnis, suku, agama tetapi hidup bersama, saling menghromati, menjadi kekuatan bersama menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Disadari bahwa masyarakat Desa Wayame yang multikultural ini dapat hidup bersama di tengah situasi konflik 2000, ditemukan adanya identitas yang menyatukan secara emosional orang basudara, salam-sarani di Desa Wayame Ambon. Identitas multikultural menjadi kekuatan untuk memelihara integrasi bangsa di Maluku Ambon maupun di Maluku Tengah Saparua. Bagaimana masyarakat multikultur memelihara integrasi bangsa di tengah ancaman anti integrasi. Saling menerima dengan memperkuat identitas multikultur salam-sarani menjadi model memelihara integrasi bangsa di Maluku.

### C. Memperkuat Indentitas Multikultural Salam – Sarani

Secara sosiologis-antropologis, terdapat kesatuan budaya yang dianut oleh masyarakat Maluku Tengah Saparua sejak dahulu, hidup dalam konsep Salam-Sarani. Negeri-negeri terbentuk dalam perbedaan kelompok, secara teritori maupun agama, yaitu ada Negeri Salam dan Negeri Sarani. Pemisahan sosial dalam bentuk kelompok negeri ini menimbulkan solidaritas primordial yang kuat di kalangan anggota kelompok. Di satu pihak terdapat solidaritas kelompok yang berbasis negeri, di lain pihak terdapat pula solidaritas kelompok berbasis agama.

Segregasi kelompok agama ini semakin diperkuat dengan wacana negara di tahun 1970-an dalam rangka tercipta stabilitas, diperkenalkan paradigma mayoritas-minoritas dalam manajemen pembangunan. Paradigma ini terwujud dalam ber-

bagai produk undang-undang maupun praktik kenegaraan. Praktik kenegaraan dan berbangsa yang sangat kental dengan paradigma ini ialah Undang-undang No. 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa. Isinya menegaskan bahwa dalam penyeleenggaraan pemerintahan seluruh daerah diseragamkan dengan mengikuti pemerintahan umum. Otomatis sejak dikeluarkannya undang-undang ini, melumpuhkan fungsi pemerintahan adat. Wujud paradigma mayoritas-minoritas ini merupakan apresiasi dari nilai-nilai budaya Jawa yang dipaksakan pemberlakuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di awal tahun 1990-an basis paradigma mayoritas-minoritas mulai berubah, yaitu dari dominasi budaya Jawa menjadi dominasi keagamaan. Pendekatan mayoritas-minoritas berdasarkan nuansa keagamaan berubah esensi, konsep Salam-Sarani yang bernuansa kultural menjadi konsep Islam-Kristen yang universal. Implikasinya terjadi politisasi agama semakin kuat dan mempertajam segregasi sosial yang sudah ada di masyarakat. Mengantisipasi berkembangnya nuansa eksklusivisme agama dalam masyarakat, maka pemerintah negeri Sirisori Salam dan pemerintah negeri Sirisori Sarani menyikapinya dengan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menghilangkan konsep Salam-Sarani pada nama Negeri Sirisori Salam dan Negeri Sirisori Sarani. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku No. 146/SK/39/89 tentang Penetapan Jumlah serta Nama Desa dan Kelurahan di Provinsi Maluku Tengah tahun 1988/1989, terjadi perubahan nama desa/negeri: Sirisori Islam menjadi Sirisori, Sirisori Sarani menjadi Sirisori Amalatu. Alasan utama menghilangkan konsep identitas Salam-Sarani pada nama negeri masing-masing ini terjadi agar masyarakat tidak dikotak-kotakkan berdasarkan agama.

Walaupun demikian dalam realitas aktivitas kehidupan keseharian warga masyarakat Negeri Sirisori Salam dan Negeri

Sirisori Sarani, tetap menggunakan identitas diri mereka sebagai anak negeri Sirisori Salam atau anak negeri Sirisori Sarani. Sekalipun telah terjadi konflik politisasi agama etnis, tidak merubah cara pandang masyarakat Saparua terhadap konsep identitas dirinya sebagai anak negeri Salam dan anak negeri Sarani. Bahkan melalui konsep identitas anak negeri Salam-Sarani masyarakat Saparua memposisikan dirinya memiliki karakter, dialek bicara dan pola hubungan sosial yang khas, berbeda dengan masyarakat lain di luar Saparua. Adapun kekuatan mempertahankan identitas diri ini, tidak hanya kuatnya hubungan kekerabatan pela dan gandong tetapi juga hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam kesatuan kebudayaan. Kuatnya perekat kesatuan budaya ini, membuat semakin terpeliharanya konsep identitas diri anak negeri Salam-Sarani di Saparua dari generasi ke generasi berhadapan dengan berbagai perkembangan ke depan.

Kekuatan identitas diri Negeri Salam-Negeri Sarani di Saparua, juga terjadi di Kota Ambon, di Desa Wayame yang sejak tahun 1987 telah ditetapkan secara administrasi sebagai Desa, pada wilayah Kecamatan Teluk Ambon, menjadi Ibukota Teluk Ambon. Letak Desa Wayame yang sangat strategi ini membuka peluang masuknya migran penduduk, mula-mula suku Buton (Sulawesi Tenggara) menempati lokasi pemukiman Keranjang dan Waringin. Dengan dibukanya pemukiman BTN di Wayame, berdatangan penduduk dari berbagai daerah menempati desa Wayame. Data Statistik Desa Wayame tahun 2012/2013, jumlah penduduk 5.344, berdasarkan daerah asal/etnis: Maluku, Buton, Aceh, Batak, Minang, Sunda, Jawa, Madura, Bugis, Makassar, Minahasa, Flores, Timur, Ternate, Papua, yang terdiri dari 15 sub-etnis. Perbedaan sub etnis tentu menjadi ancaman bagi hidup bersama, namun masyarakat Wayame telah membuktikan kuatnya hidup bersama dengan rukun di saat konflik tahun 1999. Masyarakat Wayame menjadi model

hidup bersama, saling menerima, saling percaya, dengan identitas etnik berbeda namun menerima Maluku sebagai daerah hidup bersama. Modal menjaga kebersamaan membuat perkembangan ekonomi semakin meningkat, Wayame menjadi kota pusat perdagangan di Kecamatan Teluk Ambon. Pola interaksi terus menerus masyarakat, dengan dialek Ambon, menunjukkan identitas diri ganda, identitas multikultural kekuatan membangun kebersamaan sebagai Indonesia.

Giddens memandang identitas diri ini terbangun oleh kemampuan untuk mempertahankan narasi diri. Di dalam narasi diri, yang dituntut adalah kemampuan untuk membangun perasaan yang konsisten soal kesinambungan biografi diri. Identitas diri bukanlah sifat distingtif atau bahkan kumpulan sifat-sifat yang dimiliki individu. Identitas adalah diri sebagaimana yang dipahami secara refleksif oleh orang dalam konteks biografisnya. Konstruksi identitas dapat dilihat sebagai penciptaan perbedaan yang dibentuk secara historis; pemikiran seperti ini menekankan konstruksi identitas sebagai sebuah proses sosial “menjadi” sekaligus juga terjadi, juga sebagai upaya memposisikan ketimbang sebuah esensi. Membangun sebuah identitas adalah juga sebuah permainan sejarah, budaya dan kekuasaan secara terus menerus dalam berbagai situasi (Anthony, 1991) (Chris, 2000) (Li, 2000).

Pada identitas diri seperti inilah yang mendorong anak Negeri Salam-Sarani di Saparua, melalui interaksi para pelaku sehari-hari, konsep identitas diri sebagai anak Negeri Salam-Sarani tetap diproduksikan kembali. Hal ini menunjukkan identitas tidak dapat eksis di luar representasi budaya. Identitas bukan merupakan esensi tetap yang dimiliki, tetapi identitas “menjadi”. Pada pemahaman identitas seperti ini, menunjukkan bahwa identitas tidak mungkin bisa dipisahkan dari tindakan si pelaku. Hanya melalui ekspresinya di tingkat tindakan, simbol

(termasuk identitas) memperoleh pemaknaannya sekaligus perwujudannya (J, 1988).

Menurut Stuar Hall konstruksi identitas merupakan proses sosial di mana dua sisi muncul secara simultan yaitu penggabungan dan perbedaan. Bentuk-bentuk dari penggabungan dan perbedaan ini disebut dengan istilah artikulasi membutuhkan proses pembuatan batas-batas sekaligus pula menghubungkan yang tidak bersifat permanen, melainkan tergantung pada konteks di mana kepentingan penggabungan maupun pemisahan tersebut memiliki relevansi bagi agen. Tania Li dalam penelitiannya tentang bagaimana identitas etnik orang-orang Laudje dan Lindu di Sulawesi Tengah, mengakui bahwa kerangka teoretis dari Hal ini sangat membantunya dalam memecahkan problem empirik dan politik dari sebuah proses pembentukkan identitas sosial (Stuart, 1991) (Li, 2000).

Dalam pandangan Li, konsep artikulasi dan pemosision diri hal ini memberikan dimensi kontekstual dan relasi kekuasaan pada proses pembentukkan sebuah identitas (etnik) yang ia teliti. Melalui kasus artikulasi identitas etnik di Sulawesi, Li memberi catatan bahwa konstatasi kekuasaan terjadi dalam proses artikulasi identitas tersebut dalam konteks memperoleh akses atas sumber daya alam. Agensi menurut Li, terlibat dalam proses pemilihan dan kombinasi dari elemen-elemen yang membentuk sebuah ruang identitas etnik yang dikenali, termasuk di dalamnya proses pembedaan hubungan-hubungannya.

Pada masyarakat di Ambon-Saparua tergolong masyarakat yang heterogen, tidak hanya terdiri dari kelompok beridentitas agama anak Negeri Salam-Sarani saja, tetapi juga ada orang dagang/para pendatang. Kekayaan sumber daya alam Saparua, khusus cengkih dan pala, sejak dahulu telah menarik para pedagang dari luar Maluku; orang Cina, Arab, Buton, Makasar, Jawa di Saparua dan telah membaur dengan anak

Negeri Salam-Sarani. Walaupun orang dagang telah berbaur dengan anak negeri, umumnya tradisi nenek moyangnya tetap dipertahankan. Ini nampak pada upaya orang dagang mengartikulasikan dan memposisikan diri mereka, di satu sisi tetap memiliki identitas etnis asalnya sebagai orang Cina, Arab, Buton, Makasar, Jawa.

Pada sisi yang lain, untuk mempertahankan diri berada di tengah masyarakat berbeda etnis dengannya, orang dagang menggunakan juga identitas diri sebagai anak Negeri Saparua anak Negeri Ambon. Dalam aktivitas keseharian orang dagang menyebut dirinya sebagai "orang Buton Saparua"- orang Buton Ambon, "orang Jawa Saparua- orang Jawa Ambon", "orang Arab Saparua"- orang Arab Ambon, dan lainnya. Identitas ini merupakan identitas yang dikonstruksikan oleh orang dagang berperan dalam membangun relasi kekuasaan dengan anak negeri untuk mendapatkan akses atas sumber daya alam di Saparua, sekaligus sebagai pelestarian hidup mereka di Saparua. Identitas multikultural ini menjadi bagian dari upaya memposisikan diri si pelaku, menunjukkan konstruksi jati dirinya dalam interaksi dengan orang lain di luar lokal budayanya. Giddens menyebut identitas sebagai proyek diri, bahwa identitas merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, yang memiliki kemampuan diri, sesuatu yang selalu dalam proses, suatu gerak maju dari membangun apa yang dipikirkan, diharapkan dari identitas diri. Apa yang dipikirkan agen pelaku akan berubah-ubah dari lingkungan yang satu ke lingkungan lain, dalam pertentangan ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu subjek mampu berpikir dan mengenal identitas dirinya sebagai sebuah proyek diri (*self identity as a project*) dan agen berusaha untuk menyusun lintas biografi dirinya dari masa lalu, ke masa depan lintas harapan ke depan (Anthony, 1991).

Identitas bersifat individu, juga sosial, identitas diri diciptakan melalui proses sosial. Proses itu terjadi dalam

diskursus bahasa. Bahasa memungkinkan individu melakukan interaksi dengan individu yang lain. Dalam interaksi suatu biografi diri menjadi mungkin untuk terbentuk. Dengan demikian, biografi diri tidak muncul secara individu, tetapi terbentuk melalui interaksi dengan yang lain. Bahasa merupakan simbol kultural, dari bahasa didapati modus pemaknaan dan penamaan terhadap perjumpaan sehari-hari si pelaku, dari yang paling kecil hingga ke dimensi sosialitas yang lebih besar lagi. Betapa pun bahasa berperan positif bagi pembentukan makna, bentuk-bentuk kekuasaan justru mendasari di balik beroperasinya bahasa. Bahasa menempati posisi strategi bagi penyemaian ideologi yang ada di baliknya, serta mengandaikan modus kekuasaan tertentu dalam setiap praktik bahasa, pilihan kata, gaya mengungkapkan, hingga kandungan pengetahuan yang diungkapkan atau disamarkan oleh suatu bahasa. Karena itu bahasa menjadi penting bagi individu dan masyarakat dalam kelompok tertentu untuk meraih, melanggengkan, bahkan mempertahankan identitas diri dan ruang hidup para agen pelaku (Chris, 2004).

Penggunaan identitas multikultur orang dagang di Saparua, orang dagang Ambon menunjukkan: 1) Secara biografi identitas etnis nenek-moyangnya, tetap melekat dengannya, tetapi dirinya sadar bahwa kini, ‘diri’nya ada dalam ruang yang menghidupinya, mengharuskannya untuk menyatu dengan diri dengan identitas lokal; 2) identitas multikultur menunjukkan bahwa orang dagang bukan lagi orang “luar”, tetapi telah “membecer” orang “dalam”, berusaha menerima budaya lain menjadi budayanya. Sebaliknya anak negeri di Saparua, tidak menolak, bahkan menerima pengakuan orang dagang sebagai yang menjadi. Saling menerima inilah yang mendorong orang dagang yang telah mengungsi selama konflik di luar Saparua, memilih dan mengambil keputusan, untuk kembali ke Saparua. Selain meneruskan usaha dagangannya tetapi merasa diterima kem-

bali oleh anak negeri Saparua sebagai bagian dari komunitasnya; 3) dengan identitas multikultur yang digunakan orang dagang di Saparua, sebagai bagian dari upaya memposisikan diri dalam konteksnya, yang berbeda dengan orang dagang di tempat yang lain. Orang Cina Saparua, berbeda dengan orang Cina yang ada di Ambon, dan lainnya. Kekhasan identitas multikultur ini ditunjukkan pada kemampuan orang dagang di Saparua, membuktikan, bahwa dirinya menyatu dengan anak negeri Saparua, ditunjukkan melalui interaksi orang dagang dengan anak negeri, dengan menggunakan gaya bicara (dialek lokal), bahkan sekali-kali dalam percakapan menggunakan bahasa daerah setempat.

Bahasa dan gaya sebagai simbol yang digunakan dalam praktik sosial berlangsung secara terus menerus dan berulang sebagai upaya membangun kebersamaan, saling percaya dan saling bergantung. Identitas dimaknai melalui kepercayaan dan sikap, identitas ini bersifat personal sekaligus sosial yang menandai bahwa agen pelaku berbeda dengan orang lain. Menurut Sutrisno, Giddens memandang identitas bersifat sosial, berhubungan dengan hak, kewajiban dan sanksi normatif yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain identitas bersifat dualitas struktur, personal dan sosial, lokal dan nasional, hasil konstruksi agen pelaku. Identitas sepenuhnya bersifat kultural, identitas tidak bisa eksis di luar representasi budaya. Identitas juga bukan merupakan esensi (realitas) tetap yang dimiliki setiap orang, tetapi merupakan suatu entitas yang bergerak "menjadi". Identitas yang menjadi ini perlu diperkuatkan dalam memelihara integrasi bangsa (Bourdieu, 1998) (Sutrisno, 2007).

## **D. Cara Memperkuat Identitas Multikultural Memelihara Integrasi Bangsa di Maluku**

### **1. Membudayakan Nilai Agama “Saling Menghormati”**

Agama selain telah menjadi alat provokasi dalam konflik politisasi agama, tetapi ada sejumlah nilai-nilai keagamaan dapat menjadi budaya lokal dalam menciptakan integrasi bangsa. Masyarakat menyatakan bahwa agama memberi penguatan spiritual dalam kehidupan manusia. Tokoh-tokoh agama, berperan sebagai fasilitator mensosialisasikan nilai-nilai keagamaan sebagai nilai-nilai inti, memantapkan masyarakat beragama untuk tunduk pada nilai-nilai itu. Didukung dengan aktivitas ritual agama sehari-hari, menyampaikan pokok-pokok doa dan dialog bersama, menjadi kekuatan membangun kebersamaan lintas agama di Saparua. Sekalipun realitas sosial di Ambon, bahwa telah terjadi segregasi pemukiman berdasarkan perbedaan agama. Namun segregasi itu pula selama ini menimbulkan toleransi beragama khas Maluku, persoalannya mengapa agama menjadi kekuatan integrasi bangsa.

Brian Morris mengutip Geertz, memandang agama sebagai sistem simbol yang bertindak memantapkan perasaan (*moods*) dan memiliki motivasi yang kuat, menyeluruh dan bertahan lama pada diri manusia, dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai hukum/keteraturan (*order*) yang berlaku umum dan menyelimuti konsep-konsep ini dengan suatu warna tersendiri mengenai hakikatnya yang nyata sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi yang ada nampaknya secara tersendiri adalah mengenai “yang nyata”. Dengan menggunakan batasan ini berarti: Pertama agama digunakan oleh warga masyarakat sebagai pandangan hidup yang berfungsi menjelaskan keberadaan manusia di dunia, dari mana ia berasal, dan ke mana ia akan pergi sesudah meninggal, dan

agamalah satu-satunya bagian kebudayaan yang mampu menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. Itulah sebabnya agama dikatakan sebagai inti kebudayaan (Geertz, 1992). Kedua, oleh karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya, maka berarti agama juga terkait erat dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan, politik, ekonomi, dan sebagainya (Morris, 2003).

Agama sebagai sistem simbolis menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi dan untuk menghadapi lingkungannya. Bahwa simbol-simbol keagamaan itu penuh dengan muatan emosi dan perasaan, maka ajaran-ajaran agama yang diketahui dan dianut oleh seorang warga masyarakat adalah suatu pedoman hidup yang diyakini sepenuhnya akan kebenarannya.

Dalam agama terdapat sesuatu yang suci yakni, simbol-simbol suci dan atur yang bersifat normatif yang memandu kehidupan sehari-hari manusia beragama. Ritzer mengutip Durkheim memandang agama itu sendiri sebagai sistem keyakinan yang utuh serta praktik-praktik kehidupan yang mampu mempersatukan ke dalam kesatuan moralitas masyarakat. Agama merupakan lambang kolektifitas masyarakat dalam bentuknya yang ideal. Karena itu agama merupakan sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui upacara-upacara atau ritus-ritus, dan kesadaran kolektif adalah sumber solidaritas yang mendorong setiap orang yang beragama sama untuk bekerja bersama. Keyakinan dari kesadaran kolektif tercermin dalam aturan-aturan sebagai norma-norma, yang harus ditaati memperkuat kesadaran kolektif. Keyakinan kolektif penting bagi individu-individu berhadapan dengan tantangan fakta sosial. Dalam kasus bunuh diri egoistik, Durkheim meman-

dang integrasi suatu kelompok, berakar dari suatu jumlah dan kekuatan keyakinan dan praktik kolektif (Ritzer, 2003).

Parsons menggabungkan konsep representasi kolektif Durkheim dengan mengelompokkan agama masuk dalam sistem sosial, menunjukkan hubungan keyakinan-keyakinan sebagai standar moral, karena moralitas itu berasal dari agama. Parson mereduksi peranan ritual agama dalam menciptakan dan memelihara solidaritas. Orang-orang yang memiliki bersama keyakinan dan ritual agama akan menyandang komunitas moral dan interaksi antara ritual dan keyakinan bersama sehingga menciptakan kohesi yang berakar dari satu sama lainnya. Sistem bergantung pada kesepakatan, nilai-nilai, norma-norma, dan sistem sebagai mekanisme untuk mempertahankan konsensus. Agama dipandang baik oleh Geertz, Durkheim dan Parson sebagai sistem nilai yang memiliki bersama nilai-nilai, norma-norma, keyakinan-keyakinan yang ada pada masyarakat dan manusia dikendalikan oleh sistem sosial dalam menciptakan konsensus atau integrasi. Sebab keyakinan agama dalam sistem sosial adalah konsensus.

Berbeda dengan pandangan Weber, terfokus pada pengaruh keyakinan agama terhadap tindakan. Bagi Weber, dunia sebagaimana kita saksikan terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena ia memutuskan untuk melakukan itu untuk mencapai apa yang dikehendakinya. Setelah manusia memilih sasaran, diperhitungkan keadaan, kemudian memutuskan tindakan. Struktur sosial adalah produksi dari tindakan itu, cara hidup adalah produk dari pilihan yang dimotivasi. Berbeda dengan pemikiran Durkheim, Parson dan Geertz yang memandang tindakan manusia dikendalikan oleh struktur-fungsional, manusia dikendalikan oleh nilai-nilai, norma-norma dalam sistem sosial sesuai keyakinannya. Weber melakukan rekonstruksi

makna di balik kejadian sejarah yang menghasilkan struktur dan bentuk sosial. Dalam kehidupan beragama, bagi Weber, peranan pemimpin agama dalam mempromosikan berbagai macam ide dan orientasi pada masyarakat sangat penting. Namun individu yang memilih untuk bertindak sesuai keyakinan agamanya. Keyakinan agama mempengaruhi tindakan manusia. Nasib tidak digariskan oleh Tuhan, melainkan manusialah yang harus mengubah nasibnya sendiri. Sejalan dengan pemikiran ini, Weber memandang konsensus atau integrasi diproduksi oleh tindakan manusia, bukan sistem keyakinan umat beragama. Weber mengakui peran pemimpin agama mensosialisasikan aturan-aturan, norma-norma agama sangat penting, mendorong individu beragama bertindak berdasarkan keyakinannya yang benar (Ritzer, 2005).

Dalam kehidupan manusia, agama berfungsi sebagai suatu sistem nilai dan norma yang memiliki daya ubah (*transformability*) bagi komunitas pelakunya. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan berperilaku agar sejalan dengan tuntutan agamanya. Agama dalam hal ini diartikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang ditunjukkan oleh individu, kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai suatu kebenaran. Di samping itu, agama juga merupakan refleksi iman seseorang yang tidak terbatas pada kepercayaan, tetapi juga berimplikasi merefleksi dalam perilaku kehidupan sehari-hari atau yang disebut sebagai perilaku beragama. Perilaku keberagamaan, akan melahirkan berbagai kreasi budaya dengan nilai kepercayaan yang dikandungnya. Manusia dan agama merupakan dua sisi yang saling berpengaruh. Sebagai unsur yang dibutuhkan manusia agama memberikan layanan

psikologi kepada manusia untuk menyajikan sesuatu yang dibutuhkannya. Sementara itu manusia di sisi lain, memberikan pengaruh secara signifikan dalam proses perubahan nilai yang banyak dipengaruhi oleh agama dalam membentuk tatanan dalam masyarakat (Robertson, 1993).

Posisi agama sebagai institusi yang mendorong tindakan manusia, peranan manusia dan interaksi dan relasi yang terarah. Bachtiar Efendi melihat peran dan fungsi agama dalam masyarakat sebagai berikut: (Efendi, 2001)

Pertama, fungsi edukatif, yang terkait dengan upaya pemindahan dan pengalihan (transfer) nilai, norma keagamaan kepada masyarakat. Agama sanggup memberi orientasi dan motivasi serta membantu untuk mengenal dan memahami sesuatu yang dianggap "sakral".

Kedua, agama berfungsi sebagai penyelamat. Ketika agama memberikan rasa kedamaian, ketika agama memberikan rasa ketenangan dan ketika agama memberikan rasa ketabahan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sulit dihadapi manusia, maka ketika itu agama berfungsi membimbing dan mengarahkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan.

Ketiga fungsi agama sebagai kontrol sosial. Agama memberikan pembatasan dan pengkondisian terhadap tindakan atau perilaku individu dan masyarakat. Bentuk kontrol sosial agama terhadap masyarakat adalah fungsi profetik atau fungsi kritis agama. Agama berusaha memberikan kritis evaluasi terhadap masalah-masalah sosial dan agama berupaya menjaga terciptanya dan tegaknya keadilan sosial.

Keempat, agama berfungsi sebagai sistem relasi sosial yang berfungsi integratif. Agama menjadi sumber utama terbentuknya integrasi dalam masyarakat. Agama bahkan

dipandang memiliki kemampuan membangun tatanan sosial yang mapan dan kuat.

Kelima, agama berfungsi sebagai transformatif dalam perubahan sosial. Agama berfungsi mengubah bentuk, bagaimana agama memiliki daya ubah tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Fungsi agama di atas memperlihatkan bahwa agama terbentuk sebagai institusi yang menyusun pola-pola tindakan, peranan dan relasi yang terarah. Tindakan atau perilaku keagamaan sebagai realitas berwujud; sistem kepercayaan, pengungkapan praktik sebagai sistem persembahan, serta pengungkapan sosiologi sebagai sistem hubungan masyarakat (*system of social relation*), yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ajaran agama mengandung nilai-nilai: kemanusiaan, keadilan dan kedamaian yang membentuk jiwa manusia beragama. Terwujud dari nilai-nilai agama ini tindakan manusia untuk saling menghormati, menjunjung kemanusiaan sejati sebagai bagian dari keyakinan pada Yang Maha Kuasa. Tindakan saling menghormati harus tercermin dalam bertindak adil, menciptakan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai keagamaan dari saling menghormati mendorong manusia beragama untuk hidup dalam kedamaian dengan orang lain, menghormati hak asasi orang lain, dan berperilaku adil, bermoral dalam kehidupan bersama lintas agama, wujud dari integrasi baru.

## 2. Memperkuat Nilai Saling Percaya (*Trust*)

Dalam kerja sama saling percaya (*trust*) menjadi dasar harus dibuktikan dalam perilaku yang jujur, dapat dipercayai orang lain. Di sinilah *trust* yang terjadi dalam hubungan antar individu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan. Untuk maksud itulah, Giddens mengembangkan apa yang disebutnya *active trust*. *Active trust* selanjutnya oleh

Giddens dijadikan sebagai upaya menjaga berlangsungnya hubungan murni (*pure relation*) dalam masyarakat. Yang dimaksudkan dengan hubungan murni adalah hubungan yang didasarkan atas komunikasi emosional, di mana imbalan yang diperoleh adalah kelangsungan hubungan tersebut. Tindakan integrasi dalam ekonomi lokal antaretnis ini didasari pada nilai saling percaya (*trust*), tercipta ikatan kerja sama antaranak negeri dan orang dagang, yang saling bergantung satu sama yang lain yang memperkuat kerja sama lintas etnis melalui interaksi sehari-hari para pelaku, memperkuat kerja sama ekonomi lokal, dalam mewujudkan integrasi baru di pascakonflik (Giddens, 1992).

Konsep *trust* yang dikembangkan Giddens pengaruh dari Erik Homburger Erikson adalah seorang psikoanalisa kelahiran Jerman yang sangat terkenal dengan 8 tahapan perkembangan psikologi manusia, *trust* mulai terlihat sejak bayi, *trust* harus ditata dengan baik oleh ibu atau pengasuhnya, karena *trust* akan berubah menjadi ketidakpercayaan (*distrust*) apabila tidak dikembangkan dengan baik. Sebaliknya bila *trust* dikelola dengan baik, maka ketika seseorang mencapai tahap dewasa, dia mampu menemukan identitasnya. Dan dengan identitas itulah seseorang masuk dalam kehidupan sosial yang lebih dekat oleh Erikson disebut sebagai kemampuan untuk melibatkan dirinya ke dalam ikatan-ikatan konkret dan persekutuan, dan mengembangkan kekuatan etis untuk mematuhi kesepakatan bersama.

Di sini *trust* bukan merupakan sesuatu yang given, melainkan yang selalu diusahakan. Apabila seseorang memiliki *basic trust*, maka ia memiliki modal dasar untuk memasuki kehidupan sosial yang baik. Dia mampu melakukan hubungan akrab dengan orang lain, tanpa menghilangkan identitasnya dan sekaligus mampu menghargai orang lain (Erikson H, 1989). Konsep *trust* ini diusung Giddens ke

dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Trust dalam interaksi antar individu harus diusahakan, karena itu Giddens mengembangkan dengan apa yang disebutnya *active trust*, sebagai upaya menjaga berlangsungnya hubungan murni (*pure relation*) dalam masyarakat.

### 3. Tindakan Reflektif sebagai Strategi Memperkuat Identitas Multikultural Memelihara Integrasi Bangsa

Menghadapi konflik politisasi agama dan etnis, individu-masyarakat, agen-struktur di Saparua, tidak hanya menggunakan kekuatan sistem sosial mengendalikan pikiran dan tindakan individu memelihara keteraturan yang ada. Tetapi dengan kemampuan transformatif para pelaku menggunakan strategi monitoring, memilih, memutuskan tindakannya menciptakan keamanan bagi dirinya dan orang lain. Fredrik Barth dalam analisis mengenai proses politik pada masyarakat Swat Pathan di Pakistan Utara. Barth mengemukakan bahwa kestabilan sistem politik masyarakat terpelihara bukan karena adanya keseimbangan persaingan struktural antara berbagai komponen kelompok sosial seperti studi pada orang Nuer di Afrika. Melainkan adanya organisasi Nuer sebagai institusi persatuan, pengendali konflik di antara mereka. Barth memandang sistem ini dilahirkan dan dipelihara oleh para pelaku, berusaha memperbesar kekuasaannya melalui pilihan-pilihan dan koalisi yang strategi (Barth, 1994).

Keesing (Roger, 1992) mengutip Bailey menganalisis proses politik di India, dengan meneliti bagaimana cara seorang individu berusaha untuk memperoleh kekuasaan. Bailey mengamati berbagai strategi individual dalam usaha untuk memperbesar dan memelihara kekuasaan serta nama baik dalam suatu sistem sosial menciptakan stabilitas, dengan meninjau strategi-strategi informal maupun berbagai ideologi dan peraturan-peraturan formal. Bailey berargumen

bahwa dalam kehidupan nyata sebagian besar orang terikat dengan norma-norma yang berlaku dan karena itu orang lebih tertarik mengikuti sistem, padahal manusia sehari-hari dapat melawan sistem yang ada. Sebab manusia makhluk yang berpikir dan merasa dan berbuat, manusia bisa memanipulasi keteraturan normatif itu. Bailey membedakan antara aturan-aturan normatif dan pragmatik, yang terkait dengan norma dan tindakan. Seluruh perilaku keseharian manusia memberikan gambaran adanya keteraturan.

Keteraturan diciptakan manusia, Arendt Hannah memandang manusia dalam tiga dimensi *vita active*-nya, yaitu kerja (*labor*), karya (*work*) dan tindakan (*action*). Dari ketiganya, yang mengekspresikan dan mengkonstitusikan dimensi politik manusia adalah tindakan. Politik menurut Arendt bukanlah bawaan (dan karena itu niscaya), melainkan buatan (dan karena itu kontingen). Politik adalah suatu tindakan strategi. Tetapi tindakan itu sendiri tidak mungkin tanpa masyarakat. Kalau aktivitas lain (kerja dan karya) dapat dimengerti di luar masyarakat, maka tindakan tidak demikian. Bahkan tindakan adalah prerogatif eksklusif manusia. Melalui tindakan manusia dibedakan dari spesies binatang. Manusia dipandang sebagai makhluk yang bertindak dan bertutur, ekspresi dan komunikatif. Manusia bertindak berarti manusia, mulai melakukan pilihan-pilihan dan menciptakan (Baehr, 2000).

Antropologi politis memandang manusia adalah makhluk politik sebagai hasil konstruksi tindakan bebas dan sadarnya, bukan sebagai bawaan alamiah. Manusia dapat melakukan berbagai strategi sebagai upaya manusia mempertahankan hidupnya dan hidup orang lain. Manusia tidak hanya dikendalikan oleh sistem dan struktur tetapi juga akan merubah struktur melalui pikiran dan tindakannya.

Menyadari bahwa sekalipun telah terkonstruksi integrasi baru pascakonflik, sebagaimana diuraikan di atas, namun potensi konflik akan tetap hidup seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak bila ada kesempatan (Parsudi, 2003). Ada berbagai potensi terpendam yang memungkinkan munculnya konflik baru bila ada kesempatan. Inilah resiko masyarakat modern, Giddens melihat resiko itu tidak datang dari alam untuk manusia tetapi resiko itu merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri, resiko itu sebagai *manufactured risk*. Persoalannya bagaimana agen-struktur, membentuk dan membentuk kembali diri agar mampu menghadapi perubahan di lingkungannya (Giddens, 1995).

Karena kondisi-kondisi baru tetap akan muncul di sekitar agen pelaku dan membuat agen-struktur harus mampu mengelola dan memberikan makna kepada dunia yang tidak stabil, dengan cara-cara baru yang muncul dari kesadaran dan tindakan agen.

Bagi Giddens satu-satunya arah tindakan manusia dalam situasi ini adalah membentuk diri sendiri. Artinya dengan tindakannya manusia secara rutin beradaptasi dengan kesadaran dirinya, tentang apa yang sedang terjadi, membentuk diri, suatu identitas agar sesuai dengan kondisi dan tak harus begitu besok. Inilah proses yang disebut Giddens sebagai refleksivitas. Refleksivitas adalah nama yang diberikan Giddens untuk menemukan sekuriti ontologisme di dalam keadaan ketidakamanan, muncullah refleksi diri, yang bertolak dari kesadaran diri datang dari dalam. Melalui refleksi diri manusia mencari cara-cara lain untuk menjadikan dirinya dan mewakili diri orang lain. Jika diri menemukan sesuatu adalah cara yang didapat untuk menunjukkan diri, sebagai unsur material dari kebudayaan konsumen yang menjadi ekspresi identitas diri (Giddens, 1999).

Dalam hal ini tubuh menjadi wadah penampilan fisik manusia, memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai diri yang semakin refleksif, menunjukkan suatu kesadaran bahwa identitas dipilih dan dikonstruksi. Sebagaimana dikatakan Giddens, diri dalam “modernitas akhir” telah menjadi proyek refleksif: Diri itu diciptakan (atau diciptakan kembali) melalui pluralitas pilihan dan keputusan gaya hidup. Tubuh menjadi sosok nyata pembawa identitas diri dan tubuh semakin terintegrasi ke dalam keputusan-keputusan gaya hidup yang diambil individu. Refleksivitas diri nampak melalui tindakan strategi bertahan menghadapi realitas kemungkinan konflik baru (Anthony, 1991) (Jones, 2009).

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strat-egia*” yang berarti kepemimpinan atas pasukan, atau seni memimpin pasukan. Hingga awal zaman industrialisasi, pengertian strategi hampir hanya terbatas pada bidang militer. Baru sesudah itu, kepemimpinan atas sejumlah besar orang diperlakukan pula di bidang ekonomi. Sejak itu pengertian strategi memperoleh perkembangan makna. Terciptalah strategi perusahaan yang diperlukan dalam kepemimpinan terencana atas orang-orang dalam suatu perusahaan. Sedikit demi sedikit pengertian strategi makin diperluas ke berbagai aspek masyarakat. Tentu saja pengertian ini juga diperluas di bidang politik, karena menggerakkan massa dalam jumlah besar atau anggota politik dan organisasi untuk mencapai tujuan, juga berlaku dalam bidang antropologi.

Strategi dipandang sebagai cara-cara, kiat-kiat yang dikembangkan pelaku dalam interaksi dan negosiasi berbagai kepentingan-kepentingan pelaku. Steilah Vinthagen mengutip dari De Certeau membedakan antara strategi kekuasaan dengan taktik perlawanan. Strategi adalah saran yang digunakan kekuasaan yang menciptakan suatu ruang

bagi dirinya sendiri yang terpisah dari lingkungannya yang menjadi tempat untuk mengoperasikan objek kehendak. Taktik adalah permainan jebakan, tipu daya, pemalsuan kehidupan sehari-hari, berusaha menciptakan ruang yang dapat ditinggalkan. Menghadapi berbagai ke-mungkinan konflik baru, bagi Giddens, agensi memiliki kapasitas transformatif, yang memampukan pelaku memonitor tindakan sehari-hari secara refleksif, tidak saja pelaku memonitor aktivitasnya, tetapi juga memonitor secara rutin aspek fisik, sosial dan konteks aktivitas tersebut. Berdasarkan hasil monitoring refleksif, pelaku belajar dari pengalamannya untuk melakukan tindakan yang lebih baik di waktu mendatang (Vinthagen, 2006).

Dari tindakan reflektif "diri", pelaku berinteraksi dengan "diri" yang lain dan membentuk kelompok kerja sama. Kerja sama yang diciptakan para pelaku atas dasar saling percaya (*trust*) dan saling bergantung. Setiap kelompok yang dibentuk dari interaksi para pelaku sehari-hari, tidak membentuk diri dalam institusi atau organisasi.

Tetapi setiap kelompok memiliki ciri-ciri struktur, ada kesepakatan bersama sebagai pedoman yang relevan bagi tindakan yang dilakukan bersama. Juga didukung sarana yang tersedia pada si pelaku yakni, skema interpretasi, fasilitasi dan norma-norma yang ada. Kelompok-kelompok kerja sama ini, antara lain kelompok: Pengemudi motor ojek, pekerja bangunan, perempuan usaha kecil, petani-nelayan, pemuda dan anak-anak. Kelompok kerja sama ini ada dalam suatu kolektifitas masyarakat, sehingga gerakan kelompok kerja sama ini sebagai gerakan kolektifitas dalam rangka mengkonstruksikan serta memelihara integrasi bangsa.

## E. Penutup

Disadari pengaruh globalisasi, dapat mendorong kekuatan manusia untuk mempolitisasikan agama, etnis bukan mustahil

akan memporakporandakan adat budaya yang menjadi jati diri sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan konsep integrasi bangsa. Persoalannya bagaimana memelihara integrasi bangsa melalui penguatan identitas multikultural. Pendekatan identitas multikulturalisme dapat digunakan untuk memelihara integrasi bangsa. Mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, integrasi bangsa bersifat kultural dengan pendekatan teori stukturasi Giddens yang mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Bagaimana masyarakat menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Melalui tindakan manusia masyarakat menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia. Komitmen masyarakat multikultur di Maluku memperkuat identitas multikultural mengandung semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Memelihara integrasi bangsa produksi tindakan pelaku yakni agen-struktur, individu-masyarakat, terletak pada kekuatan ke empat perangkat budaya: Sosial-budaya, agama, ekonomi dan politik. Keempat perangkat budaya ini ada dalam satu sistem. Berangkat dari kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal akan integrasi kebudayaan produksi tindakan.

Melalui tindakan, manusia menciptakan kebudayaannya me melihara integrasi bangsa.

Lebih jauh multikulturalisme memiliki pengertian dan kepentingan yang lebih luas karena konsep ini ingin memaknai dirinya tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga regional, nasional, dan global. Secara praktis konsep identitas multikultural dapat digunakan untuk mendukung tujuan integrasi bangsa, pada batas-batas tertentu. Hal inilah yang nampaknya yang mendorong pihak-pihak yang berwenang di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi multikulturalisme yang dapat dikembangkan pada masa mendatang dalam rangka memelihara integrasi bangsa.

### 1. Pikiran Rekomendatif untuk Maluku Masa Depan

Identitas multikultural pada masyarakat kepulauan di Maluku, perlu diperkuat. Mengingat bahwa masyarakat terus berkembang dan perubahannya tak dapat diduga, maka kekuatan memelihara integrasi tidak hanya terletak pada kekuatan para pelakunya, juga masih dibutuhkan peran negara atau pemerintah. Bila masyarakat menciptakan integrasi pascakonflik dengan melestarikan nilai-nilai integrasi Solidaritas, kesamaan, keamanan. Dibutuhkan peran aktif negara untuk membela nilai-nilai yang terkandung dalam integrasi ini. Pembelaan negara haruslah nampak dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan berbasis masyarakat dan berpusat pada manusia, mengarahkan pelaku pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih luas. Negara harus memberi kesempatan kepada warganya untuk pendidik pemberdayaan manusia pada semua bidang ekonomi, sosial-budaya, politik, agar warga negara mampu menanggapi perubahan dalam masyarakat dan tetap melestarikan integrasi bangsa.

Untuk menjaga agar integrasi yang telah diciptakan, dibentuk, diupayakan oleh individu-masyarakat, di Maluku; Wayane Ambon dan di Saparua, dibutuhkan pendampingan pemerintah provinsi Maluku, Maluku Tengah. Peran pemerintah daerah Maluku sebagai fasilitator memperkuat kelompok-kelompok kerja sama baru hasil rekonstruksi budaya lokal: Pela dan gandong baru lintas agama-etnis, dan kerja sama pertemanan baru pada kelompok-kelompok kerja, melalui pemberdayaan masyarakat. Diharapkan Pemerintah Daerah Maluku dapat berperan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan masyarakat "bawah" individu maupun kolektif berperan serta dalam melestarikan integrasi bangsa di bumi Maluku.

Integrasi tercipta tidak berarti tercapainya keadaan tanpa konflik. Integrasi lebih merujuk pada keadaan, bukan sebagai suatu patologis, melainkan sebagai dinamika demokrasi yang harus dikelola dengan perhatian pada inteligensi politik yang kreatif. Pendekatan keamanan yang selama ini bersifat *top-down*, sudah harus ditinggalkan. Dari proses integrasi pascakonflik sebenarnya menunjukkan bahwa keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sosial, dengan sendirinya muncul di permukaan sebagai akibat dari proses pendewasaan masyarakat. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat "bawah", "akar rumput" adalah kerja dan hidup, tidak lagi konflik, sebab itu masyarakat berupaya menciptakan situasi aman dan nyaman bagi dirinya dan orang lain.

Langkah konkret untuk mewujudkan dan memperkuat integrasi bangsa dibutuhkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses penyadaran yang berwawasan sosial edukatif mencakup keragaman hidup beragama, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan multikultural mendorong terwujudnya kesadaran tentang keaneka-

ragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan sebagai strategi dalam mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya. Pendidikan multikultural di sini bukan hanya merujuk pada pendidikan formal di sekolah, namun dalam pengertian luas sebagai transmisi kebudayaan yang bisa terjadi di berbagai arena baik formal maupun non-formal. Dalam hal ini pendidikan multikultural merupakan proses di mana seseorang mengembangkan kompetensi dalam berbagai macam standar untuk memahami, menilai, menyakini, dan bertindak dalam berbagai interaksi dengan orang lain. Dalam hal ini memahami kebudayaan tidak hanya berhubungan dengan kelompok etnis, namun lebih pada sekelompok orang yang terlibat satu sama lain yang secara berulang-ulang dalam satu atau lebih kegiatan. Dengan cara ini maka dialog lintas budaya dapat terjadi karena setiap orang memiliki beragam kompetensi kebudayaan baik berbeda maupun sama kelompok etniknya, dapat berinteraksi dan menghargai satu sama yang lain.

## Daftar Pustaka

- Ana Irhandayaningsih (2018) 'Kajian Filosofis terhadap Multikulturalisme Indonesia', *Jurnal Oasis*.
- Anthony, G. (1991) *Modernity and self-identity*. Cambrigde: Politics.
- Azra, A. (2007) Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Baehr, P. (2000) *What Is Freedom?* New York: Penguin Books.
- Barth, F. (1994) *A Person View of Present Tasks and Priorities in Cultural and Social Anthropology, Borosfsky, Assessing Cultural Antroplogy*. New York: Mc Graw-Hill.
- Bourdieu, P. (1998) *Practical Reason: On the Theory of Action*. Canbrigde: Stanford University.
- Chris, B. (2000) *Cultural Studies, theory and Practice*. London: Sage publication.
- Chris, B. (2004) *Cultural Studies, Theory and Practice*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Dieter, B. (1977) *Guarding The Invisible Mountain, Inerville Alliances, Religious Syngretism adn Ethnic Identity Among Ambonese Christians and Moslems in The Moluccas*. Washington: University Cornell Press.
- Efendi, B. (2001) *Masyarakat agama dan tantangan globalisasi*. Yogyakarta: Galang Bakubae Maluku & KWI.
- Erikson H, E. (1989) *Idenitas dan Siklus Hidup Manusia*. Edited by A. Cremers. Jakarta: Gramedia.
- Geertz, C. (1992) *Tafsir Kebudayaan*. Pertama. Yogyakarta: Kanisius.
- Giddens, A. (1992) *The Transformation of Intimacy: Sexualiy, Love and Eroticism in Modern Societies*. Cambrigde: Stanford University Press.

- Giddens, A. (1995) *The Constitution of Society*. Edited by A. T. A. Rahman. Cambridge: Citra Mentari Group.
- Giddens, A. (1999) *Runaway World: how globalisation is reshaping our lives*. London: Profile Books.
- Golberg, D. (1995) *The Multiculturalism: a Critical Reader*. Cambridge: Blackwell Publisher Inc.
- Hidayah, S. dan Z. (2000) *Plotik dan Etnisitas: Rekonstruksi Kemelayuan di Riau*. Jakarta: LIPI dan Ford Foundation.
- J, T. (1988) *A Theory of Social Interaction*. California: Stanford University Press.
- Jatmiko, S. (2006) *pendidikan multikultural yang berkeadilan sosial*. I. Yogyakarta: Misereor/KZE.
- Jones, P. (2009) *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. Pertama. Edited by A. F. Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Li, T. (2000) *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*. California: Berkeley: University of California.
- Morris, B. (2003) *Antropologi Agama*. Pertama. Edited by M. Syukri. Yogyakarta: AK Group.
- Parekh (2000) *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Parsudi, S. (2003) *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: Yayasan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Richard, A. (1995) *The Color Problem*. New York.
- Ritzer, G. (2003) *Modern Sociological Theory*. Pertama. Edited by A. Sumrahadi. Yogyakarta: Juxtapose research and publication study club.
- Ritzer, G. dan G. (2005) *Moderen Sociological Theory*. ketiga. Edited by M. Sumrahadi. Yogyakarta: Juxtapose research and publication study club.

- Robertson, R. (1993) *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*. Edited by A. F. Saifuddin. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roger, K. (1992) *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Edited by Soekadi. Jakarta: Erlangga.
- Rozi, S. (2013) Konstruksi Identitas Agama Dan Budaya Etnis Minangkabau Di Daerah Perbatasan: Perubahan Identitas Dalam Interaksi Antaretnis Di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, *Jurnal Masyarakat Indonesia*.
- Rubin, D. dan V. (2009) *American Multiculturalisme*. Amsterdam: Amsterdam University Prees.
- Stuart, H. (1991) *Old and New Ethnicities*. Edited by D. King. London: The Macmillan Press.
- Subkhan, I. (2020) Eulogi Achmad Fedyani Sifuddin, Lokomotif Antropologi Untuk Semua Orang. Edited by Y. S. & Arief. Jakarta: Departemen Antropologi Fisip UI.
- Sutrisno, M. dkk (2007) *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori besar Kebudayaan*. Jakarta: Koekoesan.
- Taylor (1994) *Multiculturalisme: Examining the Politics of Recognition*. Amerika Serikat: Princeton University.
- Thompson, K. (1997) *National Culture and Multiculturalisme*. London: Association with the Open Universitty.
- Vinthagen, S. (2006) *Power as Subordination and Resistance as Disobedience: Non-Violent Movements and the Management of Power*. Sweden: Departement of Peace and Development Reisearch Gothenburg University.

## Tentang Penulis



**Eklefina Pattinama** lahir di Ambon pada 1 Juni 1960. Bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Teologi UKIM Ambon pada tahun 1979 Melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan memperoleh gelar Magister pada tahun 1999. Gelar Doktor diperoleh dari Program Antropologi Universitas Indonesia Pendidikan pada tahun 2010. Pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Teologi Fakultas Teologi UKIM pada tahun 2000-2005, menjabat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Teologi UKIM pada tahun 2010-2015, dan pada periode 2015-2020 menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Perempuan dan Anak UKIM serta Sekretaris Laboratorium Sosial Pengalaman Berteologi Fakultas Teologi UKIM. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Teologi Fakultas Teologi UKIM masa bakti 2020-2025. Beberapa hasil penelitian dan pemikiran yang telah dipublikasikan, yaitu 1) Di Antara Ada dan Tiada, Kajian Filsafat Teologi Tentang Eksistensi Allah, bab dalam buku Ziarah Berteologi Lokal (Kumpulan Tulisan Dalam Rangka HUT Ke-130 Fakultas Teologi UKIM Ambon), Fakultas Teologi UKIM, tahun 2015; 2) Krisis Ekologi dan Panggilan Merawat Bumi dengan Semangat Spiritualitas Ekofeminis, tahun 2017; 3) Perempuan Ambon Arika Merekonstruksikan Budaya Lokal, bab dalam buku Kebhinnekaan dan Kebangsaan Masyarakat Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon, tahun 2018; 4) Perempuan Tenun di Maluku Merawat Alam dengan Semangat Spiritualitas Ekofeminis, bab dalam buku Berteologi Untuk Keadilan dan Kesetaraan, Kanisius, tahun 2020; 5)

Strategi Bertahan Hidup Keluarga Nelayan Hadapi Perubahan Iklim Perspektif Gender di Desa Seri, Silale dan Dusun Waimahu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Jurnal Masohi Vol. 1, No. 2, 2020.



**Fransisca Jallie Pattiruhu** lahir di Kota Ambon, 02 Februari 1994. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon dan melanjutkan S2 Pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana. Penulis menekuni Bidang Ilmu Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Tata Negara. Pada tahun 2019 diangkat menjadi dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Penulis terlibat sebagai Tim Pengelola Pusat Studi Gender dan Anak IAKN Ambon pada Bidang Jaringan dan Advokasi. Penulis terlibat dalam penelitian hibah dosen IAKN Ambon tahun 2020 dengan judul: Konservasi Permainan Tradisional Sebagai Media Pembelajaran Multidisipliner Bahasa, Hukum, dan Matematika di Paud Melissa Desa Airlouw Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Adapun jurnal terpublish; *Critical Legal Feminism Pada Kedudukan Perempuan Dalam Hak Waris Pada Sistem Patriarki*. Selain itu juga penulis terlibat dalam penulisan buku modul materi dengan judul: *Peningkatan Kreativitas Guru Kelas Sekolah Dasar Melalui Pelatihan dan Praktik Membuat Bahan Ajar di Masa Pandemi Covid-19*.

# **MALUKU MASA DEPAN**

*Bunga Rampai Pemikiran Para Akademisi Maluku*

**Di Bidang Sosial Humaniora**

Buku dengan judul "Maluku Masa Depan: Bunga Rampai Pemikiran Para Akademisi Maluku" ini lahir sebagai bentuk kecintaan penuh terhadap proses pengembangan ilmu pengetahuan dan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi implikasi praktisnya untuk kemanusiaan dan alam semesta, terutama bagi pembangunan Maluku. Bunga rampai pemikiran yang terkompilasi dalam buku ini merupakan potret ilmiah terhadap realitas kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, keragaman dan keunikan sosial budaya Maluku beserta segala permasalahannya.

Buku ini memuat hasil penelitian dan pemikiran para akademisi dengan beragam topik, yaitu: 1) Otonomi Desa di Maluku; 2) Penetapan Hukum Terhadap Desa Adat di Maluku; 3) Identitas Multikultural Salam-Sarani di Maluku Sebagai Model Memelihara Integrasi Bangsa; 4) *Folk Dialogue* Sebagai Modal Sosial Dalam Mewujudkan Perdamaian Islam-Kristen di Maluku; 5) Preservasi Bahasa Daerah Maluku Melalui Model Pembelajaran Multilingual; 6) Pewarisan Nyanyian Suku Babar di Maluku Barat Daya: dari Tradisional Menuju Digitalisasi; dan 7) *Opo Fot: Nyanyian Memancing Ikan Dalam Kajian Etnomusikologi*.

Meskipun kumpulan tulisan hasil penelitian dan pemikiran para peneliti yang ada di dalam buku ini belum secara utuh memotret realitas sosial budaya Maluku yang begitu kaya, namun gagasan-gagasan luar biasa di dalamnya dapat memperluas cakrawala pembaca tentang Maluku Masa Depan lewat kacamata para akademisi.

Selamat menimba dan menikmati dari sumur ilmu pengetahuan yang telah disediakan di dalamnya. Semoga buku "Maluku Masa Depan" ini dapat bermanfaat bagi masa depan Maluku.



Penerbit Insan Cendekia Mandiri  
Kapalo Koto No. 8, Selayo, Kec. Kubung, Solok  
Email : [penerbitblc@gmail.com](mailto:penerbitblc@gmail.com)  
Website : [www.insancendekiamandiri.co.id](http://www.insancendekiamandiri.co.id)



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

